

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR DASSA TAHUN 2017	2
Transparansi Penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)	3
A Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	3
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	4
- Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	4
- Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris.....	5
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komisaris.....	5
- Tugas dan Tanggungjawab Komisaris.....	5
- Rekomendasi Dewan Komisaris.....	6
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.....	6
4 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	
a. Fungsi Kepatuhan.....	7
b. Audit Internal	7
c. Audit Eksternal.....	7
5 Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian intern.....	8
6 Penyedia Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyedia Dana Besar (<i>Related Party</i>) atau BMPK.....	8
7 Rencana Strategis Bank	
1. Target Jangka Pendek.....	9
2. Target Jangka Menengah.....	9
8 Transfaransi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.....	10
B Kepemilikan Saham Direksi dan Kepemilikan Saham Komisaris...	11
C Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	
a. Hubungan Keuangan.....	11
b. Hubungan Keluarga.....	12
D Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	12
E Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	13
F Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	13
G Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	13
H Permasalahan Hukum.....	14
I Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	14
J Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik....	14
K Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan good Corporate Governance.....	15

LAMPIRAN

Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT.
BPR DASSA

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR DASSA TAHUN 2017

Dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, PT. BPR Dassa memandang perlu untuk memberikan yang terbaik untuk para nasabah serta debitur. Melihat perkembangan industri perbankan begitu pesat. Perkembangan tersebut pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur resiko Bank. Oleh karena itu, Manajemen PT. BPR Dassa menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) begitu penting untuk di laksanakan dan diterapkan di lingkungan Bank secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, karena semakin baiknya pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR sekarang dan di masa mendatang.

Adapun laporan pelaksanaan GCG ini, selain untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Laporan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kesetaraan.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR DASSA

Adapun Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.

- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
- c. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank agar dapat mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah sehingga dapat menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Transparansi Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

- Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 baru berjumlah 1 (satu) orang, namun pada saat laporan ini disusun sudah genap 2 orang. Sama jumlahnya dengan anggota Direksi.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dengan komposisi per 31 Desember 2017 :

Direktur Utama : Tubagus Sidik Jaya Permana

Direktur : -

Namun pada saat laporan ini disusun adalah :

Direktur Utama : Tubagus Sidik Jaya Permana

Direktur : Inge Djawanto

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- Laporan tindak lanjut atas Audit OJK 2017
- Tindak lanjut atas target RKAT 2017
- Tindak lanjut atas pemenuhan struktur organisasi
- Tindak lanjut untuk RBB 2018

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komisaris.

Dewan Komisaris BPR per 31 Desember 2017 adalah :

Komisaris : Agus Hendarto

Komisaris : -

Dewan Komisaris BPR pada saat laporan disusun adalah :

Komisaris : Agus Hendarto

Komisaris : Anton

Tugas dan tanggung jawab Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah menunjuk pejabat eksekutif sebagai audit internal dan dilaporkan untuk disetujui OJK.

- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- SOP yang berlaku.
- Rekomendasi pemberian kredit pihak terkait.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017.
- Persetujuan RBB untuk tahun 2018 PT. BPR Dassa.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi.
- Rekomendasi pemberian kredit karyawan BPR.
- Rekomendasi KAP.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas komite –komite

Modal inti PT. BPR Dassa per 31/12/2017 sebesar Rp 10.844.532.000 sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Pejabat Eksekutif oleh Direktur Utama sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan melalui Surat Keputusan Direksi No.006/ORG/BPR DASSA/X/2017
- Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk tahun 2017 belum ada, mengingat saat itu BPR hanya memiliki 1(satu) orang Direktur.

b. Audit Internal

- Pelaksanaan fungsi audit internal telah dilaksanakan secara baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Tiga Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan) dan Audit Tahunan.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik(KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

5. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian Intern

Dalam menerapkan Manajemen Resiko bank telah memiliki kebijakan(SOP) Manajemen Resiko yang di dalamnya terdapat penetapan limit resiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. SOP tersebut Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap lini bisnis.

Begitupun dalam upaya memitigasi resiko penyaluran kredit, BPR memiliki Komite Kredit sebagai berikut :

- Komite Kredit BPR Dassa terdiri atas 3 personel, yaitu: Direktur, Kepala Bagian Operasional dan Marketing.
- Komite Kredit bekerja secara independen
- Komite Kredit dengan asas prudent mampu menganalisa kredit secara baik dalam menunjang keputusan yang dibuat
- Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan, SOP dan peraturan yang berlaku

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait(*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar(*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Rencana Strategis Bank

1. Target jangka pendek

a. Perubahan Core Banking System

Tahun 2017 BPR masih menggunakan FoxPro sebagai core banking system dan akan segera dirubah menjadi CoinCore.

b. Pembukaan Kantor Cabang

Untuk meningkatkan penyerapan dana masyarakat dan penyaluran kredit, BPR berencana akan membuka kantor cabang di wilayah Tangerang Selatan, sehingga market didaerah tersebut dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan asset dan laba BPR.

c. Peningkatan efisiensi

Melakukan segala upaya untuk menurunkan biaya operasional perusahaan dengan tindakan nyata dalam menekan over head cost dan terus mendorong pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan agar dapat menurunkan persentase BOPO.

2. Target jangka menengah

a. Penguatan permodalan

Untuk meningkatkan penyebaran kredit dan meningkatkan portofolio kredit, BPR berencana akan meningkatkan modal.

b. Penerapan tata kelola dan manajemen resiko

- Target penerapan tata kelola jangka menengah, antara lain pelaksanaan paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris dan direksi, akan disesuaikan seiring dengan perkembangan kinerja BPR.

- Target penerapan manajemen risiko, antara lain:
Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

c. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat:

- Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- Sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian intern.
- Produk dan aktivitas baru.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
Laporan tahunan dan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1(satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada website PT. BPR Dassa (penambahan fitur dan kelengkapan website masih terus dilakukan oleh IT BPR).

4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.

B. Kepemilikan Saham Direksi dan Kepemilikan Saham Komisaris

Nama	Jabatan di BPR Dassa	Kepemilikan Saham di BPR Dassa	Jabatan BPR Lain	Kepemilikan Saham BPR lain	Jabatan Perusahaan Lain	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain
Agus Hendarto	Komisaris Utama	-	-	-	Dirut Karunia Multi Finance	-
Anton	Komisaris	-	-	-	-	-
Tubagus Sidik Jaya P	Dirut	-	-	-	-	-
Inge Djawanto	Direktur	-	-	-	-	-

C. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

a. Hubungan Keuangan

- Tidak ada hubungan keuangan maupun hubungan keluarga antara Komisaris dan Direksi PT. BPR Dassa.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dassa tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank maupun dengan Dewan Komisaris.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Dassa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Agus Hendarto	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Anton			√		√		√		√		√		√
Tb. Sidik Jaya Permana	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Inge Djawanto			√		√		√		√		√		√

D. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Pada tahun 2017 perusahaan masih dalam recovery sehingga belum adanya pembagian tantiem.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
	Orang	Orang
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan tunjangan jabatan)	1	2
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. tidak tetap lainnya alat transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	0	2

E. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2 %
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 0 %
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 0 %

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Tatib Dewan Komisaris).
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

G. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pengurus Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

satuan

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0

Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

H. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR DASSA, selama tahun 2017 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpananan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum Jumlah	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Sampai dengan tahun 2017, bank belum menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

J. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh BPR DASSA selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial belum dilakukan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh BPR.

K. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR DASSA periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai komposisi GCG sebelum MR 1,97 dengan predikat baik
- Nilai komposisi GCG setelah MR 2,06 dengan predikat baik

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR DASSA tahun buku 31 Desember 2017

Demikian laporan ini disampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

PT. BPR Dassa

Agus Hendarto
Komisaris Utama

Anton
Komisaris

Tb. Sidik Jaya Permana
Direktur Utama

Inge Djawanto
Direktur